



Received: 05 Desember 2023 | Accepted: 30 Juni 2024 | Published: 30 Juni 2024

Sosialisasi Netralitas Pemilihan Umum dan Edukasi Bagi Pemilih Pemula Di SMA Yayasan Wanita Kereta Api (YWKA)

Neta Dian Lestari¹, Siti Chairunnisa², Siti Fatimah³, Tri Ananda Putri⁴, Dimas Zulfiqri⁵, Virgo Anraguta Pratama⁶

¹Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ²Fakultas Teknik, ³Universitas PGRI Palembang

¹neta_obyta@yahoo.com, ²Stchairunnisa2002@gmail.com, ³sitifatimahpatim@gmail.com,

⁴trianandaputri2003@gmail.com, ⁵dimaszulfiqri3@gmail.com,

⁶virgoanragutapratama2020151037@gmail.com

Abstract

The importance of electoral neutrality is important for beginners in participating in the democratic process. Electoral neutrality is the principle that any individual, institution, or organization must remain objective and non-partisan in the general election process, in order to preserve its fairness and integrity. Election neutrality is important for the beginner to ensure that their vote is decisive in the universal election process and to maintain the quality of democracy.

One who is neutral in elections must have an objective attitude, not be biased, not influenced by propaganda or political pressure, and be able to analyze the vision and mission of the candidate fairly. Violations of electoral neutrality can lead to injustice in the electoral process, unfair use of public resources, and undermine people's confidence in electoral institutions. Some of the ways to maintain neutrality in elections are by researching candidates' vision and mission, not being influenced by superficial impressions, not spreading false news, and not actively engaged in political campaigns. Maintaining neutrality in elections has challenges, such as political pressure, the possibility of rumors affecting perceptions, as well as the spread of fake news that can affect the elections of newcomers.

Keywords: *Socialization Neutrality, Election, Beginner Voters*

Abstrak

Pentingnya netralitas pemilu penting bagi pemula dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi. Netralitas pemilu adalah prinsip bahwa setiap individu, lembaga, atau organisasi harus tetap objektif dan tidak memihak dalam proses pemilihan umum, guna menjaga keadilan dan integritasnya. Netralitas pemilu penting bagi pemula untuk memastikan bahwa suara mereka menjadi penentu dalam proses pemilihan umum dan menjaga terjaganya kualitas demokrasi.

Seorang yang netral dalam pemilu harus memiliki sikap objektif, tidak memihak, tidak terpengaruh oleh propaganda atau tekanan politik, serta mampu menganalisis visi dan misi calon secara adil. Seorang yang netral dalam pemilu harus memiliki sikap objektif, tidak memihak, tidak terpengaruh oleh propaganda atau tekanan politik, serta mampu menganalisis visi dan misi calon secara adil. Pelanggaran netralitas pemilu dapat menyebabkan ketidakadilan dalam proses pemilihan, penggunaan sumber daya publik secara tidak fair, serta merusak kepercayaan rakyat terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Beberapa cara menjaga netralitas dalam pemilu antara lain dengan meneliti visi dan misi calon, tidak terpengaruh oleh kesan-kesan yang dangkal, tidak menyebarluaskan berita bohong, serta tidak terlibat dalam kampanye politik secara aktif. Menjaga netralitas dalam pemilu memiliki tantangan, seperti adanya tekanan politik, kemungkinan adanya desas-desus yang memengaruhi persepsi, serta penyebaran berita palsu yang dapat mempengaruhi pemilihan pemula.



Kata kunci: Sosialisasi Netralisasi, Pemilu, Pemilih pemula

Pendahuluan

Pemilihan Umum merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara. Tujuan utama dari pemilu adalah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan suara mereka dan memilih para pemimpin yang akan mewakili mereka di pemerintahan. Dalam Pemilihan Umum, warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memberikan suara mereka kepada kandidat atau partai politik yang mereka pilih. Hasil pemilu kemudian digunakan untuk menentukan siapa yang akan memegang jabatan politik, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional.

Pemilihan Umum bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga negara, dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas. Pemilu yang adil, bebas, dan transparan sangat penting dalam menjaga integritas demokrasi suatu negara. Menurut UU Pemilu Bab IV pasal 198 (Ayat 1), Pemilih Pemula adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah/pernah menikah, yang mempunyai hak memilih dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu.

Pemahaman mengenai konsep dan pentingnya netralitas pemilu penting bagi pemula dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi. Netralitas pemilu adalah prinsip bahwa setiap individu, lembaga, atau organisasi harus tetap objektif dan tidak memihak dalam proses pemilihan umum, guna menjaga keadilan dan integritasnya. Netralitas pemilu penting bagi pemula untuk memastikan bahwa suara mereka menjadi penentu dalam proses pemilihan umum dan menjaga terjaganya kualitas demokrasi.

Seorang yang netral dalam pemilu harus memiliki sikap objektif, tidak memihak, tidak terpengaruh oleh propaganda atau tekanan politik, serta mampu menganalisis visi dan misi calon secara adil. Seorang yang netral dalam pemilu harus memiliki sikap objektif, tidak memihak, tidak terpengaruh oleh propaganda atau tekanan politik, serta mampu menganalisis visi dan misi calon secara adil. Pelanggaran netralitas pemilu dapat menyebabkan ketidakadilan dalam proses pemilihan, penggunaan sumber daya publik secara tidak fair, serta merusak kepercayaan rakyat terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Beberapa cara menjaga netralitas dalam pemilu antara lain dengan meneliti visi dan misi calon, tidak terpengaruh oleh kesan-kesan yang dangkal, tidak menyebarkan berita bohong, serta tidak terlibat dalam kampanye politik secara aktif. Menjaga netralitas dalam pemilu memiliki tantangan, seperti adanya tekanan politik, kemungkinan adanya desas-desus yang memengaruhi persepsi, serta penyebaran berita palsu yang dapat mempengaruhi pemilihan pemula.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai permasalahan pemilu khususnya bagi pemilih pemula maka penulis mengambil judul penelitian tentang **Sosialisasi Netralitas Pemilihan Umum dan Edukasi Bagi Pemilih Pemula Di SMA Yayasan Wanita Kereta Api (YWKA)**



Metode Penelitian

Penelitian kualitatif adalah payungnya semua jenis metode pendekatan penelitian yang diaplikasikan untuk kehidupan sosial yang alamiah/natural (Sugiyono, 2021, p. 361). Dengan penelitian ini, informasi yang didapat dianalisis sebagai kualitatif (nonkuantitatif). Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Dalam metode kualitatif deskriptif peneliti harus mendeskripsikan suatu fenomena obyek, atau *setting* sosial yang akan dicantumkan kedalam tulisan bersifat naratif. Artinya dalam penulisannya fakta dan data yang dihimpun berupa gambar atau kata bukan angka (Anggito & Setiawan, 2018, p. 11).

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang sangat utama dalam penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian ialah menghasilkan data. Tanpa memahami teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan memperoleh data yang melengkapi standar data yang telah ditentukan (Sugiyono, 2021, p. 409).

1. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sebagai sumber data penelitian yang mana peneliti terlibat dengan aktivitas sehari-hari orang yang sedang diamati. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang didapat akan lebih lengkap, serta sampai memahami pada tingkat makna dari setiap tingkah laku yang terlihat.

2. Dokumen

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan dan gambar. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, cerita, peraturan, biografi, kebijakan, dan sejarah kehidupan (*life histories*). Sedangkan dokumen yang berbentuk gambar, foto, sketsa, gambar hidup dan sebagainya (Sugiyono, 2021, p. 430).

Hasil dan Pembahasan

Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi kegiatan sosialisasi SMA Yayasan Wanita Kereta Api (YWKA). Setelah peneliti mengumpulkan data, kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dan penarikan kesimpulan.

1. Pengertian Netralitas Pemilu

Netralitas merupakan salah satu asas yang mengatur penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Netral sendiri diartikan tidak berpihak (tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak) menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI).

Netralitas merupakan hal yang perlu terus dijaga dan diawasi, agar pemilu dapat berjalan secara jujur dan adil antara calon yang memiliki kekuasaan dengan calon yang tidak memiliki relasi kuasa dilingkungan birokrasi pemerintahan. Berkaitan dengan pengaturan netralitas dalam pemilu/pilkada, peraturan perundang-undangan yang mengatur sangat beragam tidak hanya produk hukum yang berkaitan dengan pemilu/pilkada, tetapi produk hukum yang secara khusus mengatur yang dikeluarkan lembaga kementerian. Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu/pilkada yang memiliki fungsi pencegahan dan penegakan hukum berwenang menindaklanjuti temuannya atas pelanggaran netralitas yang delik pelanggarannya



diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar kepemiluan/pemilihan (hukum lainnya).

2. Peran Netralitas Pemilu Bagi Pemula

Pemilih pemula yang terdiri atas pelajar, mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17 sampai 21 tahun menjadi segmen yang memang unik, seringkali memunculkan kejutan dan tentu menjanjikan secara kuantitas.

Disebut unik, sebab perilaku pemilih pemula dengan antusiasme tinggi, relatif lebih rasional, haus akan perubahan dan tipis akan kadar polusi pragmatisme. Kesadaran politik menjadi faktor determinan dalam partisipasi pemilu atau sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi pemilu. Namun yang membedakan pemilih pemula dan kelompok lainnya adalah soal pengalaman politik dalam menghadapi pemilu sehingga apa yang dijadikan sandaran ketika menentukan pilihan cenderung gamang, tidak stabil atau mudah berubah-ubah sesuai dengan informasi atau preferensi yang melingkarinya.

Sejumlah survei menunjukkan generasi milenial dan generasi Z diprediksi menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar di Pemilu 2024. Pemilih muda atau pemilih milenial merupakan pemilih dengan rentang usianya antara 17-37 tahun. Pada Pemilu Serentak 2024 diprediksi jumlah pemilih muda akan mengalami peningkatan. Jika berkaca pada Pemilu Serentak 2019, data dari situs web KPU RI jumlah pemilih muda sudah mencapai 70-80 juta jiwa dari 193 juta pemilih. Ini artinya 35 persen sampai 40 persen pemilih muda sudah mempunyai kekuatan dan memiliki pengaruh besar terhadap partisipasi pemilu nanti.

Memahami pemilih pemula dan perangkat yang dapat menjangkaunya adalah sebuah keuntungan terutama dengan keberadaan media digital seperti media sosial saat ini. Media sosial menjadi senjata yang ampuh untuk menggaet pemilih pemula. Strategi sosialisasi dengan menggunakan media sosial seperti facebook, instagram, twitter, telegram dan sejenisnya diharapkan bisa menjadi jembatan penghubung.

Perilaku pemilih pemula yang cenderung tidak peduli dan labil terhadap dunia politik menyebabkan kesadaran dalam berpolitik kurang yang berdampak pada partisipasi pada. Dengan adanya pendidikan pemilih ataupun sosialisasi diharapkan pemilih pemula berperan aktif dalam menggunakan hak pilihnya karena pemilu dan pemilihan adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk menghasilkan pemimpin atau wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas dan bertanggung jawab dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Gambar 1.1 Sosialisasi Netralitas Pemilihan Umum dan Edukasi Bagi Pemilih Pemula Di SMA Yayasan Wanita Kereta Api (YWKA)



Kesimpulan

Pentingnya netralitas pemilu penting bagi pemula dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi. Netralitas pemilu adalah prinsip bahwa setiap individu, lembaga, atau organisasi harus tetap objektif dan tidak memihak dalam proses pemilihan umum, guna menjaga keadilan dan integritasnya. Netralitas pemilu penting bagi pemula untuk memastikan bahwa suara mereka menjadi penentu dalam proses pemilihan umum dan menjaga terjaganya kualitas demokrasi.

Seorang yang netral dalam pemilu harus memiliki sikap objektif, tidak memihak, tidak terpengaruh oleh propaganda atau tekanan politik, serta mampu menganalisis visi dan misi calon secara adil. Seorang yang netral dalam pemilu harus memiliki sikap objektif, tidak memihak, tidak terpengaruh oleh propaganda atau tekanan politik, serta mampu menganalisis visi dan misi calon secara adil. Pelanggaran netralitas pemilu dapat menyebabkan ketidakadilan dalam proses pemilihan, penggunaan sumber daya publik secara tidak fair, serta merusak kepercayaan rakyat terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Beberapa cara menjaga netralitas dalam pemilu antara lain dengan meneliti visi dan misi calon, tidak terpengaruh oleh kesan-kesan yang dangkal, tidak menyebarkan berita bohong, serta tidak terlibat dalam kampanye politik secara aktif. Menjaga netralitas dalam pemilu memiliki tantangan, seperti adanya tekanan politik, kemungkinan adanya desas-desus yang memengaruhi persepsi, serta penyebaran berita palsu yang dapat mempengaruhi pemilihan pemula.

Daftar Pustaka

- Ariyanti, D., Nawangsih, V., RizaAisyah, R. R., Yuniarti, M., Nurrahmana, A., Maulina, R., & Presetyo, R. (2021). Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu dengan Asas Luberjurdil. *Ikra-Ith Abdimas*, 4(3), 219-229.
- Awaliah, A. F., Rahmawati, F., Fadilah, J., Judatama, M. N., & Firliandoko, R. (2023). Mendorong Partisipasi Politik: Pentingnya Pemilu Dalam Pengembangan Pemilih Pemula Yang Aktif. *KARIMAH TAUHID*, 2(4), 1087-1092
- Harianja, N., Patriansyah, W., Juniasih, T. E., Marpaung, I. S., & Harahap, E. H. (2023). Edukasi pentingnya Partisipasi Pemilih Pemula Dalam pemilihan Umum Mendatang Di SMK Negeri 2 Kota Padangsidempuan. *COVIT (Community Service of Tambusai)*, 3(2), 46-53.
- Karyaningtyas, S. (2019). Urgensi Sosialisasi Pemilu Bagi Pemilih Pemula. *Majalah Ilmiah Pelita Ilmu*, 2(1)
- Kahan, P. A. (2022). *PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2019 OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Khan, A. (2022). Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 (Studi di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau). *Jurnal Niara*, 14(3), 176-181.
- Khaira, K. A., Annisa, D., & Saputri, N. (2020). UPAYA NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PIMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2020. *JISIP-UNJA/ Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, 4(2), 40-54.
- Mahyudin, M., Reni, A., Darni, D., & Hasimin, H. (2022). Sosialisasi Pentingnya Partisipasi Pemilih



Pemula. *Humanism: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 1-8.

Ramadani, R., & Mamonto, M. A. W. W. (2021). Peningkatan Kapasitas Pemilih Pemula Guna Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas (Sosialisasi Pentingnya Pengawasan Pemilu Bagi Karang Taruna Desa Kapita). *Al-Tafani Jurnal Pengabdian*, 1(1), 1-8

Suprapti, W. (2019). UPAYA SOSIALISASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 DI KOTA PALANGKA RAYA. *JURNAL SOCIOPOLITICO*, 1(2), 97-105.

Syamsuadi, A., Arisandi, D., Hartati, S., & Murtasidin, B. (2019). Menjadi Bijak Bagi Pemilih Pemula Berdasarkan Informasi Dari Media Sosial Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 2(2), 104-112.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan (Kuantitatif Kualitatif Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan)*. Bandung: alfabeta.

Warno, W. (2023). PERAN SOSIALISASI POLITIK TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILU. *Media Bina Ilmiah*, 17(7), 1777-1784.

Wenur, A. K., Liando, D., & Sampe, S. (2020). Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kabupaten Minahasa Utara. *JURNAL EKSEKUTIF*, 2(5).

